

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko organisasi termasuk adanya kegiatan indentifikasi, perencanaan, startegi, dan penilaian hal-hal negative yang dapat terjadi. Penerpana manajemen risiko berpijak apda konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan teriintegrasi dengan startegi manajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga Langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan dapat membuat organisasi menajdi sadar resiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan Keputusan dengan tujuan organisasi dapat mengambil Keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan emerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajibmealakukan penilaian Risiko, sehingga Organisasi Perangkat Daerah diharapkan mampu mengindentifikasi penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan penilaian atas resiko yang dimiliki sehingga dapat ditentukan Tindakan pencegahan dan solutif terhadap resiko yang akan hidapi sesuai dengan skala penilaian risiko.

**B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2024 bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah

#### D. RUANG LINGKUP

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2024 di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku pelaksana urusan desentralisasi dan Pembangunan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi lingkungan pengendalian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengndalian Intern**  
**Control Environment Evaluation ( CEE )**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai sebagaimana berikut :

- 1. Sudah terdapat kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Namun perlu disesuaikan kembali dengan regulasi terbaru yakni Perbub No, 39 Tahun 2021 tentang Kode Etik Melakukan reviu Kode Etik Badan Pendapatan Daerah dengan regulasi yang terbaru yakni Perbub No, 39 Tahun 2021 tentang Kode Etik
- 2. Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai, namun masih belum keseluruhan pegawai yang mengikuti
- 3. Adanya rapat internal yang diselenggarakan secara rutin tiap awal bulan, dan telah tercipta budaya kerja yang kondusif, namun demikian masih perlu untuk terus ditingkatkan.
- 4. Struktur Organisasi telah disusun selaras dengan proses bisnis organisasi, namun belum sampai ke tingkat SOP.
- 5. Sudah ada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab secara tepat, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- 6. Sudah terdapat penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya
- 7. Tim SPIP telah terbentuk, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya
- 8. Sudah terjalin kerjasama yang baik dengan Intansi Terkait, namun masih perlu ditingkatkan lagi hubungan kerjasamanya.

Guna mengatasi lingkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka diperlukan beberapa startegi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut :

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Sudah terdapat kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Namun perlu disesuaikan kembali dengan regulasi terbaru yakni Perbub No, 39 Tahun 2021 tentang Kode Etik Melakukan reviu Kode Etik Badan Pendapatan Daerah dengan regulasi yang terbaru yakni Perbub No, 39 Tahun 2021 tentang Kode Etik	Melakukan reviu Kode Etik Badan Pendapatan Daerah dengan regulasi yang terbaru yakni Perbub No, 39 Tahun 2021 tentang Kode Etik	Sekretaris	Mei 2024
2	Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai, namun masih belum keseluruhan pegawai yang mengikuti	Terus mendorong seluruh ASN Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kompetensinya melalui keikut sertaan bimtek baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal	Sekretaris	Juli 2024
3	Adanya rapat internal yang diselenggarakan secara rutin tiap awal bulan, dan telah tercipta budaya kerja yang kondusif, namun demikian masih perlu untuk terus ditingkatkan.	Rapat rutin melibatkan semua pejabat struktural dan fungsional yang ada di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris	Setiap bulan
4	Struktur Organisasi telah disusun selaras dengan proses bisnis organisasi, namun belum sampai ke tingkat SOP.	Menyusun SOP selaras dengan proses bisnis	Sekretaris	Mei 2024
5	Sudah ada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab secara tepat, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Sekretaris dan Kepala Bidang	Setiap Tribulan
6	Sudah terdapat penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.	Pembinaan SDM melalui rapat staf secara rutin setiap bulan	Sekretaris	Setiap Bulan
7	Tim SPIP telah terbentuk, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya	Evaluasi Tim SPIP secara berkala	Sekretaris	Setiap Tribulan
8	Sudah terjalin kerjasama yang baik dengan Intansi Terkait, namun masih perlu ditingkatkan lagi hubungan kerjasamanya.	Meningkatkan jalinan kerjasama dengan Instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah	Sekretaris dan Kepala Bidang	Mei 2024

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Tujuan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selaras dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten lamongan, dimana di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yaitu *”Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi PotensiSektor Unggulan”*. Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang hendak dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan.

Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021-2026 maka ditetapkan tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, yang selaras dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi 2 tujuan yaitu :

- 1. Meningkatkan Populasi Ternak dan;
- 2. Meningkatkan Kesejahteraan Peternak

B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pelaksana tugas desentralisasi sektor Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi ke dalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan sebagai berikut :

Tabel Matriks Resiko Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kertas Kerja Strategis OPD  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Nama OPD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								
Tahun Penilaian	2024								
Periode yang Dinilai	2024								
Tujuan Strategis	Meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani								
Urusan Pemerintahan	Pangan								
OPD yang dinilai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								
Tujuan Strategis Pemerintah	Meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani								
Sasaran	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan Meningkatkan produktivitas hortikultura Meningkatkan produktivitas perkebunana Meningkatkan pendapatan petani Meningkatkan manajemen internal OPD								
No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Menurunnya Populasi Ternak	RSO 01	Kepala Dinas	Terjadinya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Perubahan Anomali Cuaca	Eksternal	C	Menurunnya Ketersediaan Daging dan Telur di Masyarakat	Masyarakat/Peternak



Tabel Matrik Operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan											
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan										
Nama OPD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan										
Tahun Penilaian	2024										
Periode yang Dinilai	2024										
Tujuan Strategis											
Sasaran strategis OPD											
Urusan Pemerintahan	Pangan										
OPD yang Dinilai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan										

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	Pengawasan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Belum Optimal	ROO.01	Kabid PPHP	Kurangnya Komunikasi dengan Peternak	Internal	C	Target Pengawasan Penggunaan Sarana Petanian Tidak Tercapai	Pemerintah/Masyarakat
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai SC (Service per Conception)	Pelaksanaan	Peternak tidak menggunakan teknologi untuk beternak	ROO.02	Kabid Budidaya	Kurangnya Pembinaan dan Fasilitasi	Internal	C	Penguasaan Teknologi oleh Peternak Rendah	Peternak
3	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Prosentase Kios Obat Hewan yang Diawasi dan Dievaluasi	Pengawasan	Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewat Belum Optimal	ROO.03	Kabid Keswan	Kurangnya Kapasitas Petugas	Internal	C	Obat Hewan yang Beredar Belum Terjamin Mutunya	Peternak
4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Peningkatan Bibit Ternak yang Diawasi	Pengawasan	Data dan Informasi tentang ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) unggul tidak akurat	ROO.04	Kabid Budidaya	Kurangnya Pendekatan dan Pengawasan yang Intensif	Internal	C	Dokumen Informasi Ternak dan HPT Unggul yang Disusun Tidak Valid	Pemerintah/Masyarakat
5	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	% Luasan Tanam HPT	Perencanaan	Bantuan Hibah Tidak Tepat Sasaran	ROO.05	Kabid Budidaya	Kurang Koordinasi yang baik dengan Pengusul Penerima Hibah	Internal	C	Bantuan Hibah Tidak Sesuai Kebutuhan	Peternak
6	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Tersedia	Pelaksanaan	Tidak Adanya Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	ROO.06	Kabid Budidaya/Kabid Kesmavet	Terbatasnya Anggaran	Internal	C	Jumlah Prasarana Pertanian yang Rusak Tidak Terpelihara	Peternak
7	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ternak yang Ditangani	Pelaksanaan	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis Tidak Dapat Tertangani dan Terkendali dengan Baik.	ROO.07	Kabid Keswan	Petugas Pelaksana Kurang Kompeten, Kurang Koordinasi antar Instansi, Sarana dan Prasarana Kurang Memadai, Pelaksanaan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Tidak Sesuai dengan SOP, Munculnya Penyakit Hewan yang Sebelumnya Tidak Ada.	Internal	C	Terjadi Penularan Penyakit Hewan dan Zoonosis.	Peternak
8	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang Diawasi	Pengawasan	Masuknya Penyakit Hewan pada Hewan dan Produk Hewan yang Dilalulintaskan	ROO.08	Kabid Keswan	Pelaku Usaha Tidak Memahami Persyaratan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan	Eksternal	C	Munculnya Penyakit Hewan Melalui Hewan dan Produk Hewan	Peternak/Masyarakat
9	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Kualitas Pelayanan Kurang Memadai	ROO.09	Kabid Keswan	Petugas Kurang Kompeten dan Sarana Prasarana Kurang Memadai	Internal	C	Keluhan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Masyarakat/Peternak
10	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Produk Hewan yang Dibina dan Diawasi	Pelaksanaan	Persyaratan Kelayakan Mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tidak Terpenuhi	ROO.10	Kabid Kesmavet	Kurangnya Pembinaan dan Fasilitasi	Internal	C	Pengetahuan Pengusaha Produk Asal Hewan Ternak tentang Kelayakan Tempat Usaha Masih Kurang	Peternak

11	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase Pendampingan Unit Kesejahteraan Hewan	Pelaksanaan	Banyaknya Pemotongan Hewan Ternak yang Tidak Bisa Diawasi	ROO.11	Kabid Kesmavet	Terjadinya Pemotongan Hewan di Luar Rumah Potong Hewan (Pemerintah/Swasta)	Eksternal	C	Daging yang Beredar di Pasar Kurang Terjamin Keamanannya, Kesehatannya, Keutuhannya dan Kehalalannya (ASUH)	Masyarakat
12	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Peserta AUTSK	Pelaksanaan	Penyakit Zoonosis Tidak Terkendali	ROO.12	Kabid PPHP	Kurangnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan yang Bersifat Zoonosis (Vaksinasi, Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan)	Internal	C	Terjadi Wabah Penyakit	Peternak
13	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Budidaya yang Terdata	Pelaksanaan	Tidak Terpenuhinya Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pertanian	ROO.13	Kabid PPHP	Kurangnya Informasi yang Disampaikan kepada Pelaku Usaha Pertanian	Internal	C	Unit Usaha Pertanian Tidak Berizin	Peternak
14	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Rekomendasi Ternak yang Diterbitkan	Pelaksanaan	Tidak Terpenuhinya Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	ROO.14	Kabid Keswan	Kurangnya Informasi yang Disampaikan Kepada Pelaku Usaha tentang Persyaratan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Internal	C	Adanya Peredaran Obat Hewan yang Seharusnya Tidak Dipasarkan/Dijual dan Obat Hewan Ilegal oleh Pengecer Obat Hewan	Peternak
15	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Ternak yang Meningkat Kelasnya	Pelaksanaan	Pembinaan Kelompok Kurang Optimal	ROO.15	Kabid PPHP	Rendahnya Tingkat Kehadiran Peserta Penyuluhan	Eksternal	C	Tidak Terjadi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peternak

C. Hasil Analisis Risiko

Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam Pembangunan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapatkami sajikan melalui tabel berikut :

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Menurunnya Populasi Ternak	RSO 01	0	Kepala Dinas	Terjadinya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Perubahan Anomali Cuaca	Menurunnya Ketersediaan Daging dan Telur di Masyarakat
Risiko Operasional OPD							
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Belum Optimal	ROO.01	0	Kabid PPHP	Kurangnya Komunikasi dengan Peternak	Target Pengawasan Penggunaan Sarana Petanian Tidak Tercapai
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peternak tidak menggunakan teknologi untuk beternak	ROO.02	0	Kabid Budidaya	Kurangnya Pembinaan dan Fasilitasi	Penguasaan Teknologi oleh Peternak Rendah
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewat Belum Optimal	ROO.03	0	Kabid Keswan	Kurangnya Kapasitas Petugas	Obat Hewan yang Beredar Belum Terjamin Mutunya
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Data dan Informasi tentang ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) unggul tidak akurat	ROO.04	0	Kabid Budidaya	Kurangnya Pendekatan dan Pengawasan yang Intensif	Dokumen Informasi Ternak dan HPT Unggul yang Disusun Tidak Valid
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Bantuan Hibah Tidak Tepat Sasaran	ROO.05	0	Kabid Budidaya	Kurang Koordinasi yang baik dengan Pengusul Penerima Hibah	Bantuan Hibah Tidak Sesuai Kebutuhan
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tidak Adanya Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	ROO.06	0	Kabid Budidaya/Kabid Kesmavet	Terbatasnya Anggaran	Jumlah Prasarana Pertanian yang Rusak Tidak Terpelihara
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis Tidak Dapat Tertangani dan Terkendali dengan Baik.	ROO.07	0	Kabid Keswan	Petugas Pelaksana Kurang Kompeten, Kurang Koordinasi antar Instansi, Sarana dan Prasarana Kurang Memadai, Pelaksanaan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Tidak Sesuai dengan SOP, Munculnya Penyakit Hewan yang Sebelumnya Tidak Ada.	Terjadi Penularan Penyakit Hewan dan Zoonosis.
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Masuknya Penyakit Hewan pada Hewan dan Produk Hewan yang Dilalulintaskan	ROO.08	0	Kabid Keswan	Pelaku Usaha Tidak Memahami Persyaratan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan	Munculnya Penyakit Hewan Melalui Hewan dan Produk Hewan
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kualitas Pelayanan Kurang Memadai	ROO.09	0	Kabid Keswan	Petugas Kurang Kompeten dan Sarana Prasarana Kurang Memadai	Keluhan Masyarakat atas Layanan Pemerintah
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persyaratan Kelayakan Mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tidak Terpenuhi	ROO.10	0	Kabid Kesmavet	Kurangnya Pembinaan dan Fasilitasi	Pengetahuan Pengusaha Produk Asal Hewan Ternak tentang Kelayakan Tempat Usaha Masih Kurang

11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Banyaknya Pemotongan Hewan Ternak yang Tidak Bisa Diawasi	ROO.11	0	Kabid Kesmavet	Terjadinya Pemotongan Hewan di Luar Rumah Potong Hewan (Pemerintah/Swasta)	Daging yang Beredar di Pasar Kurang Terjamin Keamanannya, Sehatannya, Keutuhannya dan Kehalalannya (ASUH)
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyakit Zoonosis Tidak Terkendali	ROO.12	0	Kabid PPHP	Kurangnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan yang Bersifat Zoonosis (Vaksinasi, Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan)	Terjadi Wabah Penyakit
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tidak Terpenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pertanian	ROO.13	0	Kabid PPHP	Kurangnya Informasi yang Disampaikan kepada Pelaku Usaha Pertanian	Unit Usaha Pertanian Tidak Berizin
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tidak Terpenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	ROO.14	0	Kabid Keswan	Kurangnya Informasi yang Disampaikan Kepada Pelaku Usaha tentang Persyaratan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Adanya Peredaran Obat Hewan yang Seharusnya Tidak Dipasarkan/Dijual dan Obat Hewan Ilegal oleh Pengecer Obat Hewan
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pembinaan Kelompok Kurang Optimal	ROO.15	0	Kabid PPHP	Rendahnya Tingkat Kehadiran Peserta Penyuluhan	Tidak Terjadi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Adapun rencana tindak pengendalian ( RTP ) terhadap risiko di atas yang berisi jadwal, celah pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta jadwal rencana target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks formulis kertas kerja sebagai berikut :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:							
1	Menurunnya Populasi Ternak	RSO 01	Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengawasan Lalu Lintas-Hewan	Munculnya Wabah Penyakit Hewan Menular yang Sebelumnya Belum Ada	Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Kepala Dinas	Tiap Triwulan
Risiko Operasional OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:							
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Belum Optimal	ROO.01	Penyuluhan dan Pendampingan aPeternak	Efektivitas Penyuluhan dan Pendampingan Masih Perlu Peningkatan	Peningkatan Efektifitas Penyuluhan dan Pendampingan	Kabid PPHP	Triwulan 4
2	Peternak tidak menggunakan teknologi untuk beternak	ROO.02	Sosialisasi Teknologi Kepada Para Peternak	Respon Peternak Masih Rendah	Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Lebih Intens	Kabid Budidaya	Triwulan 2 dan 3
3	Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewat Belum Optimal	ROO.03	Peningkatan Kapasitas Petugas	Koordinasi dengan Intansi Terkait Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
4	Data dan Informasi tentang ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) unggul tidak akurat	ROO.04	Validasi Data dan Informasi Tentang Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Unggul	Masih Terdapat Data Yang Kurang Valid	Pendekatan dan Pengawasan Lebih Intensif	Kabid Budidaya	Tiap Triwulan
5	Bantuan Hibah Tidak Tepat Sasaran	ROO.05	Koordinasi dengan Pengusul Penerima Bantuan	Tidak Dilakukan Melalui SOP Yang Benar	Koordinasi Yang Baik dengan Pengusul Penerima Bantuan dan Dilakukan Melalui SOP yang Benar	Kabid Budidaya	Triwulan 1
6	Tidak Adanya Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	ROO.06	Memfaatkan Prasarana yang Ada	Prasarana yang Ada Perlu Dimaksimalkan	Memaksimalkan Penggunaan Prasarana yang Ada	Kabid Budidaya/Kabid Kesmavet	Triwulan 4
7	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis Tidak Dapat Tertangani dan Terkendali dengan Baik.	ROO.07	Peningkatan Kompetensi Petugas, Koordinas Antar Instansi, Penyediaan Sarana Prasarana, <div><div></div></div>	Ada Kasus/Penyakit Baru Yang Sebelumnya Belum Ada dan Lalu Lintas Hewan Ternak Tinggi.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
8	Masuknya Penyakit Hewan pada Hewan dan Produk Hewan yang Dilalulintaskan	ROO.08	Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi Antar Intansi dan KIE Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
9	Kualitas Pelayanan Kurang Memadai	ROO.09	Meningkatkan Kompetensi Petugas dan Penyediaan Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan	Manajemen Pelayanan Masih Perlu Perbaikan	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
10	Persyaratan Kelayakan Mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tidak Terpenuhi	ROO.10	Sosialisasi Kepada Para Pelaku Usaha	Kesadaran Pelaku Usaha Masih Kurang	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3

11	Banyaknya Pemotongan Hewan Ternak yang Tidak Bisa Diawasi	ROO.11	Sosialisasi Kepada Para Pelaku Usaha	Kesadaran Pelaku Usaha Masih Kurang	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3
12	Penyakit Zoonosis Tidak Terkendali	ROO.12	Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Perubahan Cuaca/Musim yang Mempengaruhi Kejadian Penyakit Hewan	Monitoring Dan Surveilans Penyakit Hewan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
13	Tidak Terpenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pertanian	ROO.13	Sosialisasi Lewat Media Sosial	Belum Semua Masyarakat Memahami	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3
14	Tidak Terpenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	ROO.14	Sosialisasi Lewat Media Sosial	Belum Semua Masyarakat Memahami	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Keswan	Triwulan 2 dan 3
15	Pembinaan Kelompok Kurang Optimal	ROO.15	Penyuluhan Lebih Intens	Penyuluhan Hanya Dihadiri Beberapa Kelompok Yang Aktif	Peningkatan Penyuluhan dengan Mengundang Semua Kelompok Peternak	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3

D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terhadap penanggulangan risiko startegis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:						
1	Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Rapat Koodinasi dan Evaluasi, Survey Lapangan	Kepala Dinas	Tiap Triwulan	-	-
Risiko Operasional OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:						
1	Peningkatan Efektifitas Penyuluhan dan Pendampingan	Rapat Koordinasi	Kabid PPHP	Triwulan 4	-	-
2	Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid Budidaya	Triwulan 2 dan 3	-	-
3	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Rapat Koordinasi	Kabid Keswan	Triwulan 2 dan 3	-	-
4	Pendekatan dan Pengawasan Lebih Intensif	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Kabid Budidaya	Tiap Triwulan	-	-
5	Koordinasi Yang Baik dengan Pengusul Penerima Bantuan dan Dilakukan Melalui SOP yang Benar	Rapat Koordinasi	Kabid Budidaya	Triwulan 1	Bulan Pebruari-Maret	Sudah selesai dilaksanakan
6	Memaksimalkan Penggunaan Prasarana yang Ada	Rapat Koordinasi	Kabid Budidaya/Kabid Kesmavet	Triwulan 4	-	-

7	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Rapat Koordinasi	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	-	-
8	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Rapat Koordinasi	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	-	-
9	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	-	-
10	Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3	-	-
11	Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3	-	-
11	Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3	-	-
12	Monitoring Dan Surveilans Penyakit Hewan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Terkait Zoonosis serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Rapat Koodinasi dan Evaluasi, Survey Lapangan	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3	-	-
13	Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3	-	-
14	Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid Keswan	Triwulan 2 dan 3	-	-
15	Peningkatan Penyuluhan dengan Mengundang Semua Kelompok Peternak	Rapat Koordinasi	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3	-	-

E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:							
1	Menurunnya Populasi Ternak	RSO 01	Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Munculnya Wabah Penyakit Hewan Menular yang Sebelumnya Belum Ada	Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Kepala Dinas	Tiap Triwulan

Risiko Operasional OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:							
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Belum Optimal	ROO.01	Penyuluhan dan Pendampingan aPeternak	Efektivitas Penyuluhan dan Pendampingan Masih Perlu Peningkatan	Peningkatan Efektifitas Penyuluhan dan Pendampingan	Kabid PPHP	Triwulan 4
2	Peternak tidak menggunakan teknologi untuk beternak	ROO.02	Sosialisasi Teknologi Kepada Para Peternak	Respon Peternak Masih Rendah	Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Lebih Intens	Kabid Budidaya	Triwulan 2 dan 3
3	Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewat Belum Optimal	ROO.03	Peningkatan Kapasitas Petugas	Koordinasi dengan Intansi Terkait Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
4	Data dan Informasi tentang ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) unggul tidak akurat	ROO.04	Validasi Data dan Informasi Tentang Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Unggul	Masih Terdapat Data Yang Kurang Valid	Pendekatan dan Pengawasan Lebih Intensif	Kabid Budidaya	Tiap Triwulan
5	Bantuan Hibah Tidak Tepat Sasaran	ROO.05	Koordinasi dengan Pengusul Penerima Bantuan	Tidak Dilakukan Melalui SOP Yang Benar	Koordinasi Yang Baik dengan Pengusul Penerima Bantuan dan Dilakukan Melalui SOP yang Benar	Kabid Budidaya	Triwulan 1
6	Tidak Adanya Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	ROO.06	Memfaatkan Prasarana yang Ada	Prasarana yang Ada Perlu Dimaksimalkan	Memaksimalkan Penggunaan Prasarana yang Ada	Kabid Budidaya/Kabid Kesmavet	Triwulan 4
7	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis Tidak Dapat Tertangani dan Terkendali dengan Baik.	ROO.07	Peningkatan Kompetensi Petugas, Koordinas Antar Instansi, Penyediaan Sarana Prasarana, <div>Belum Sesuai</div>	Ada Kasus/Penyakit Baru Yang Sebelumnya Belum Ada dan Lalu Lintas Hewan Ternak Tinggi.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
8	Masuknya Penyakit Hewan pada Hewan dan Produk Hewan yang Dilalulintaskan	ROO.08	Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi Antar Intansi dan KIE Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
9	Kualitas Pelayanan Kurang Memadai	ROO.09	Meningkatkan Kompetensi Petugas dan Penyediaan Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan	Manajemen Pelayanan Masih Perlu Perbaikan	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
10	Persyaratan Kelayakan Mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tidak Terpenuhi	ROO.10	Sosialisasi Kepada Para Pelaku Usaha	Kesadaran Pelaku Usaha Masih Kurang	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3
11	Banyaknya Pemotongan Hewan Ternak yang Tidak Bisa Diawasi	ROO.11	Sosialisasi Kepada Para Pelaku Usaha	Kesadaran Pelaku Usaha Masih Kurang	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3
12	Penyakit Zoonosis Tidak Terkendali	ROO.12	Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Perubahan Cuaca/Musim yang Mempengaruhi Kejadian Penyakit Hewan	Monitoring Dan Surveilans Penyakit <div>zoonosis, penyakit Hewan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</div>	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
13	Tidak Terpenuhinya Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pertanian	ROO.13	Sosialisasi Lewat Media Sosial	Belum Semua Masyarakat Memahami	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3
14	Tidak Terpenuhinya Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	ROO.14	Sosialisasi Lewat Media Sosial	Belum Semua Masyarakat Memahami	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Keswan	Triwulan 2 dan 3
15	Pembinaan Kelompok Kurang Optimal	ROO.15	Penyuluhan Lebih Intens	Penyuluhan Hanya Dihadiri Beberapa Kelompok Yang Aktif	Peningkatan Penyuluhan dengan Mengundang Semua Kelompok Peternak	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3

BAB IV

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Kesuksesan Pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salat satunya dipengaruhi oleh factor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam Pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ke dalam matriks sebagai berikut :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:					
1	Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Rapat Koordinasi dan Evaluasi, Survey Lapangan	Peternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tiap Akhir Triwulan
Risiko Operasional OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:					
1	Peningkatan Efektifitas Penyuluhan dan Pendampingan	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang PPHP	Triwulan 4
2	Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang Budidaya	Triwulan 2 dan 3
3	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang Keswan	Tiap Triwulan
4	Pendekatan dan Pengawasan Lebih Intensif	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang Budidaya	-Tiap Triwulan
5	Koordinasi Yang Baik dengan Pengusul Penerima Bantuan dan Dilakukan Melalui SOP yang Benar	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang Budidaya	Triwulan 1
6	Memaksimalkan Penggunaan Prasarana yang Ada	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang Budidaya dan Kesmavet	Triwulan 4
7	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang Keswan	Tiap Triwulan
8	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang Keswan	Tiap Triwulan



8 Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang Keswan	Tiap Triwulan
9 Peningkatan Manajemen Pelayanan	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Masyarakat/ Peternak	Bidang Keswan	Tiap Triwulan
10 Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Peternak	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3
11 Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Peternak	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3
12 Monitoring Dan Surveilans Penyakit Hewan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Terkait Zoonosis serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Rapat Koordinasi dan Evaluasi, Survey Lapangan	Peternak	Bidang PPHP	Tiap Triwulan
13 Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang PPHP	Triwulan 2 dan 3
14 Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang Keswan	Triwulan 2 dan 3
15 Peningkatan Penyuluhan dengan Mengundang Semua Kelompok Peternak	Rapat Koordinasi	Peternak	Bidang PPHP	Triwulan 2 dan 3



BAB V

Rancangan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu factor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas Pembangunan sektor Peternakan, guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:						
1	Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Rapat Koodinasi dan Evaluasi, Survey Lapangan	Kepala Dinas	Tiap Triwulan	-	-
Risiko Operasional OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:						
1	Peningkatan Efektifitas Penyuluhan dan Pendampingan	Rapat Koordinasi	Kabid PPHP	Triwulan 4	-	-
2	Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid Budidaya	Triwulan 2 dan 3	-	-
3	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Rapat Koordinasi	Kabid Keswan	Triwulan 2 dan 3	-	-
4	Pendekatan dan Pengawasan Lebih Intensif	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Kabid Budidaya	Tiap Triwulan	-	-
5	Koordinasi Yang Baik dengan Pengusul Penerima Bantuan dan Dilakukan Melalui SOP yang Benar	Rapat Koordinasi	Kabid Budidaya	Triwulan 1	Bulan Pebruari-Maret	Sudah selesai dilaksanakan
6	Memaksimalkan Penggunaan Prasarana yang Ada	Rapat Koordinasi	Kabid Budidaya/Kabid Kesmavet	Triwulan 4	-	-
7	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Rapat Koordinasi	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	-	-
8	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Rapat Koordinasi	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	-	-
9	Peningkatan Manajemem Pelayanan	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	-	-
10	Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3	-	-
11	Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3	-	-

12	Monitoring Dan Surveilans Penyakit Hewan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Terkait Zoonosis serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Rapat Koodinasi dan Evaluasi, Survey Lapangan	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3	-	-
13	Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3	-	-
14	Sosialisasi Lebih Intens	Rapat Koordinasi	Kabid Keswan	Triwulan 2 dan 3	-	-
15	Peningkatan Penyuluhan dengan Mengundang Semua Kelompok Peternak	Rapat Koordinasi	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3	-	-

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah Menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penangan dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam Pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Lamongan.

**Kepala Dinas Peternakan  
Dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lamongan**



**SHOFIAH NURHAYATI, SP. MSi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720420 199602 2 001